

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG SECARA
ELEKTRONIK DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN
(Studi Kasus Pembelian Barang Peralatan Komputer
Tahun 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**KHANSA LULU FATIMA
NIM. 07011281924058**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBELIAN BARANG PERALATAN
KOMPUTER SECARA ELEKTRONIK DI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**KHANSA LULU FATIMA
NIM. 07011281924058**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Maret 2023

Pembimbing 1

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si.
NIP.198809062019032016



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. M. Nur. Budiyanto. S.Sos., MPA
NIP.19691110994011001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG SECARA ELEKTRONIK DI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
(Studi Kasus Pembelian Barang Peralatan Komputer Tahun 2022)**

Skripsi

Oleh :

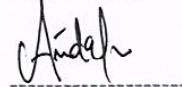
**KHANSA LULU FATIMA
NIM. 07011281924058**

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 6 April 2023

Pembimbing :

1. Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
2. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khansa Lulu Fatima
Nim : 07011281924058
Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 20 Desember 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembelian Barang Peralatan Komputer Secara Elektronik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 20 Maret 2023

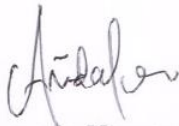

Khansa Lulu Fatima
NIM.07011281924058

ABSTRACT

This research was conducted to determine the process of purchasing computer equipment electronically at the Regional Development Planning Board of South Sumatra Province. This study identifies the problems that exist in the implementation of electronic purchasing of computer equipment (e-purchasing). These problems include missing information in the price column, network disruptions, lack of stock availability, and price discrepancies in the ordering process. This research was conducted using a descriptive-qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This study uses Mulyadi's (2016) purchasing theory with five variables, namely purchase requests, requests for price offers and selection of suppliers, purchase orders, record payables and distribution of purchases. The results of this study still have room for improvement. This is because there are still obstacles at several stages, especially at the stages of identifying needs and selecting providers. The advice that the author can give is to improve network infrastructure, improve communication with providers, and create backup plans to overcome stock availability problems.

Keywords : *purchasing, e-purchasing, and computer equipment*

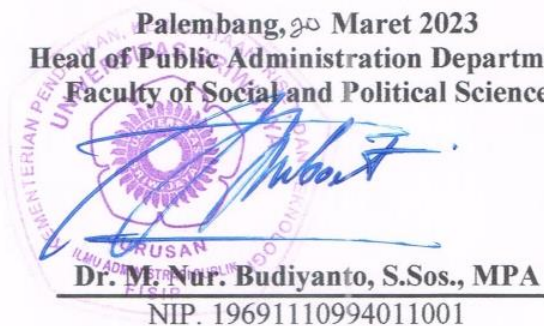
Advisor,



Annada Nasyaya, S.IP., M.Si.

NIP.198809062019032016

Palembang, 20 Maret 2023
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science



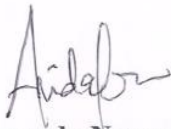
Dr. M. Nur. Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110994011001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pembelian barang peralatan komputer secara elektronik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pelaksanaan pembelian barang peralatan komputer yang dilakukan secara elektronik (*e-purchasing*). Permasalahan ini mencakup masalah informasi yang hilang pada kolom harga, gangguan jaringan, kurangnya ketersediaan stok barang, dan ketidaksesuaian harga pada proses pemesanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pembelian milik Mulyadi (2016) dengan lima variabel, yaitu permintaan pembelian, permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, order pembelian, pencatatan utang dan distribusi pembelian. Hasil penelitian ini masih ada ruang untuk perbaikan dalam. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala pada beberapa tahapan terutama pada tahapan identifikasi kebutuhan dan pemilihan penyedia. Saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan infrastruktur jaringan, meningkatkan komunikasi dengan penyedia, dan membuat rencana cadangan untuk mengatasi masalah ketersediaan stok.

Kata Kunci : pembelian, *e-purchasing*, dan barang peralatan komputer

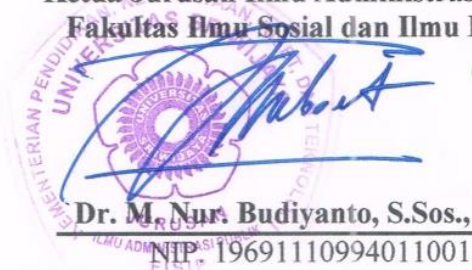
Pembimbing,



Annada Nasyaya, S.IP., M.Si.

NIP.198809062019032016

Palembang, 20 Maret 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 19691110994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat pada kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam proses menulis skripsi ini penulis mendapat bantuan dari banyak pihak, baik bersifat material maupun spiritual, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa selalu memberi semangat dan dukungan moral dan materil bagi penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan usulan penelitian ini dilakukan.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembelajaran selama masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu pegawai administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses administrasi selama masa perkuliahan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Bapak/Ibu pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Semua pihak lain yang telah berkontribusi selama penulisan usulan penelitian ini dilakukan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga seluruh keterlibatan dan bantuan yang telah diberi mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Palembang, November 2022
Penulis

Khansa Lulu Fatima

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur pelaksanaan e-purchasing	7
Gambar 2 Tampilan laman Toko Daring	10
Gambar 3 Gangguan server pada aplikasi pengadaan.....	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekap paket <i>e-purchasing</i> BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	8
Tabel 2. Invoice Tagihan Pembelian Komputer.....	9

DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDA	= Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD	= Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan Belanja Negara
LKPP	= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
SiRUP	= Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
PP	= Pejabat Pengadaan
K/L/D/I	= Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
LPSE	= Layanan Pengadaan Secara Elektronik
ULP	= Unit Layanan Pengadaan
SDM	= Sumber Daya Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak perubahan dimunculkan akibat berkembangnya teknologi komunikasi informasi (TIK) bagi sektor publik. Seiring berjalannya waktu kegiatan pemerintahan turut memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah disebut dengan *e-government*. Dengan berkembangnya teknologi informasi *e-government* menjadi metode yang dipilih untuk mengurangi masalah birokrasi yang ada di banyak organisasi pemerintah (Eyob, 2004:107). *E-government* dikenal menjadi alat yang efektif digunakan untuk penerapan *good governance* dikarenakan teknologi informasi yang mengubah cara pemerintah beroperasi. Di banyak negara *e-government* menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mengubah cara memberi pelayanan kepada masyarakat dan mengubah cara partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Lee *et.al*, 2008:183). Di Indonesia *e-government* merupakan suatu upaya yang diusahakan pemerintah guna menciptakan *good governance*. Pemerintahan yang baik atau *good governance* merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.101 Tahun 2000 merupakan pemerintahan yang menjunjung serta mengembangkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi, demokrasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi serta diterima oleh rakyat. Penerapan *e-government* tersebut dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dengan mendorong terciptanya *good governance*.

Tujuan e-government adalah memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat tanpa adanya intervensi dan dilakukan dengan pelayanan yang lebih sederhana. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi informasi, kemungkinan tindak korupsi dapat diminimalisir dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintahan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga memudahkan masyarakat menerima dan mencari informasi tentang tata kelola pemerintah.

Salah satu cara mengadopsi *e-government* sebagai usaha pemerintah dalam mendorong adanya *good governance* adalah pengadaan oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan pemerintah atau *e-procurement*. Di negara-negara barat *e-procurement* sebagai sistem informasi memudahkan organisasi pemerintah mendapatkan barang/jasa dan berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa (Hardy & Williams, 2008:155) namun ditemukan juga permasalahan *e-procurement* di negara berkembang seperti Malaysia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kaliannan dan Awang dalam Aman & Kasimin (2011:333) di Malaysia ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada penyedia barang/jasa diantaranya adalah dukungan sinyal internet yang lemah, kemampuan komputer yang belum baik serta permasalahan pada sistem informasi. Di Indonesia aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 1 aturan ini menjelaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebut juga dengan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah yang dianggarkan menggunakan APBD atau APBN diawali dengan proses identifikasi kebutuhan. Sutedi berpendapat pengadaan barang dan jasa adalah proses yang diawali dari tahap perencanaan, persiapan, perizinan,

pengumuman pemenang lelang sampai dilaksanakannya pengadaan serta tahap administrasi pada pengadaan barang dan jasa (Suprianto *et.al*, 2019:252).

Pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara yang konvensional sejak sebelum tahun 2008 dimulai. Sistem pengadaan konvensional mengharuskan terjadinya interaksi langsung antar panitia pengadaan serta penyedia barang atau jasa. Pada pelaksanaannya ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan. Kasus penyimpangan serta korupsi banyak ditemukan, dilihat dari data statistik penanganan perkara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada laman acch.kpk.go.id di beberapa laporan tahunan KPK terhiting dari tahun 2004 sampai tahun 2014, Komisi Pemberantas Korupsi sudah menyelesaikan 411 kasus korupsi yang mana 131 dari kasus-kasus tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan pada pengadaan barang/jasa. Purwanto berpendapat berbagai permasalahan dan penyimpangan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor yaitu : (a) sedikitnya *monitoring* (pengawasan); (b) wewenang yang disalahgunakan; (c) kontrak yang menyimpang; (d) kerjasama antar pejabat publik serta rekanan; (e) tidak adanya transparansi; (f) kelemahan yang dimiliki sumber daya manusia (Mulyono, 2020:33).

Inovasi yang dilakukan pemerintah berbasis *e-government* salah satunya adalah *e-procurement*, banyaknya contoh ketidakkonsistenan dalam sistem pembelian barang atau jasa saat dilakukan secara tradisional memunculkan inovasi ini. Karena ditetapkan oleh presiden sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 106 Tahun 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau dikenal juga dengan LKPP pertama kali membuat sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa. Sistem *e-procurement* pertama kali dikembangkan dalam bentuk program yang disebut INAPROC sejak tahun 2008 oleh LKPP (Nurlukman, 2018:82). Kegiatan

pengadaan yang sekarang dapat dilakukan secara elektronik dan dapat dilakukan dari lokasi mana pun dengan menggunakan internet membuat proses pengadaan menjadi praktis.

Tersedianya barang/jasa adalah salah satu kebutuhan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya di roda pemerintahan, seiring berjalannya waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan akan semakin meningkat (Damayanti et al., 2013:140). Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi. Pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi komunikasi informasi (*e-procurement*) bagi instansi pemerintah adalah hal krusial yang dibutuhkan sebagai penunjang aktivitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan ketersediaan sarana juga prasarana merupakan bagian penting dalam melaksanakan tugasnya. BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan merupakan organisasi pemerintah tingkat daerah yang keberadaanya di bidang perencanaan dan pembangunan daerah sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai upaya mencapai tujuan yang ada pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 yang menerangkan terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya disesuaikan ulang dengan kebutuhan prioritas yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas instansi terkait. Saat melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan dan pembangunan secara maksimal BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan

kegiatan pengadaan barang/jasa sebagai pemenuhan kebutuhan kantor terutama dalam pemenuhan kebutuhan peralatan komputer sebagai sarana penunjang aktivitas pegawainya. Dengan menggunakan fasilitas teknologi dan komunikasi, pelaksanaan pengadaan barang di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan sistem *e-procurement* menggunakan teknologi berbasis internet dalam pelaksanaan pengadaan peralatan komputer.

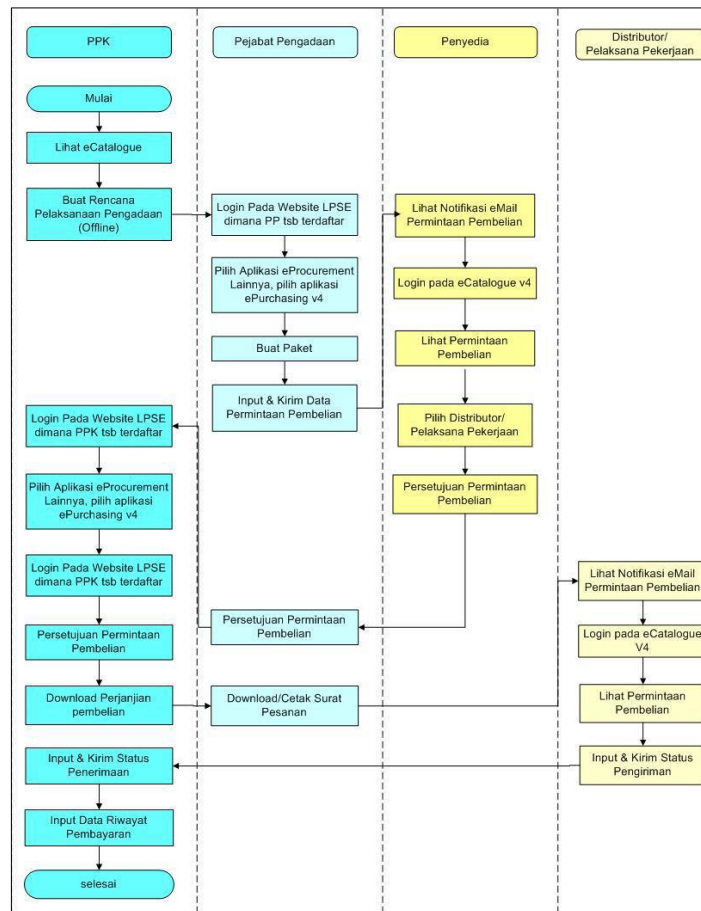
Terhitung sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan metode *e-purchasing* untuk melakukan pembelian barang peralatan komputer. Terdapat empat paket yang terdaftar pada rekap paket nasional di Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SiRUP) dengan waktu pemilihan yang berbeda-beda. Barang peralatan komputer yang dibeli antaranya adalah laptop, *scanner* dan *tab* yang digunakan untuk keperluan kantor.

Pada Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Sumsel menyebutkan bahwa *E-Tendering* atau *E-Purchasing* merupakan cara yang diutamakan dalam pembelian barang dan pelayanan dari pemerintah. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang yang baik mulai dari tahap perencanaan barang yang dibutuhkan sampai dengan selesainya kegiatan pengadaan, diperlukan pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sistem pembelian barang/jasa menggunakan E-Katalog dapat disebut juga sebagai *E-Purchasing*. Pejabat Pengadaan (PP) melakukan pengadaan barang/jasa bekerja sama dengan Penyedia Barang atau Jasa yang dibutuhkan menggunakan

metode pembelian yang dilakukan menggunakan katalog elektronik atau yang dapat disebut dengan *E-purchasing*, selama pelaksanaan pengadaannya sudah dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pada peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.37 Tahun 2016 Pasal 30 dijelaskan bahwa sistem E-Katalog atau katalog elektronik dilakukan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diharuskan melaksanakan *E-purchasing* untuk barang dan jasa yang terdapat pada sistem E-katalog berdasarkan kebutuhan SKPD. *E-Purchasing* sebagai cara membeli barang dan jasa menggunakan E-katalog atau melalui Toko Daring selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.12 Tahun 2021 pada Pasal 1.

Salah satu cara untuk melaksanakan pengadaan barang yang diterapkan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah metode *E-Purchasing* melalui aplikasi Toko Daring (Toko Dalam Jaringan). Toko Daring merupakan aplikasi pengadaan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pemerintah bekerja bersama PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai upaya menaikkan penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri) dan sebagai usaha meningkatkan keterlibatan UMK (Usaha Kecil dan Menengah) pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Toko Daring dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, merupakan sebuah sistem informasi yang diciptakan untuk memfasilitasi pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah secara elektronik.



Gambar 1 Alur pelaksanaan e-purchasing

Sumber : Panduan pengguna e-purchasing (<http://e-katalog.lkpp.3go.id>)

User atau pengguna yang melakukan kegiatan pengadaan melalui aplikasi Toko Daring merupakan Pejabat Pengadaan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Dengan mengunjungi laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Provinsi Sumatera Selatan pada <http://lpse.sumselprov.go.id/eproc4> lalu selanjutnya melakukan *login* melalui akun Pejabat Pengadaan yang telah terdaftar pada sistem lalu memilih aplikasi e-purchasing Toko Daring yang kemudian akan dialihkan menuju laman <https://tokodaring.lkpp.go.id/> Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Toko Daring. Peraturan LKPP Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Toko Daring serta Katalog Elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 menjelaskan tentang tujuan pengadaan barang melalui Toko

Daring yaitu supaya pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, transparan, dan riwayatnya tersimpan secara elektronik. Pelaksanaan *e-procurement* menggunakan aplikasi Toko Daring diharapkan dapat mempermudah pekerjaan Pejabat Pengadaan saat pembelian barang.

Sejak diberlakukannya pembelian secara elektronik, salah satunya pada pengadaan komputer, anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam pengadaan tersebut. Berikut ditampilkan rencana anggaran BAPPEDA Sumsel untuk pembelian komputer tahun 2021 dan 2022:

Tahun	Nama Paket	Pagu	Waktu Pemilihan
2022	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	249.100.000	Juni 2022
2021	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop)	67.500.000	April 2021
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop)	51.500.000	November 2021
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Scanner dan Tab)	14.500.000	November 2021

Tabel 1 Rekap paket *e-purchasing* BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SiRUP) LKPP

Data tersebut menunjukkan dana yang dianggarkan oleh BAPPEDA Sumsel untuk pengadaan pembelian komputer pada tahun 2022. Terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi anggaran pembelian peralatan komputer tahun 2022. Data tersebut dapat dilihat pada tabel invoice tagihan pembelian peralatan komputer tahun 2022 berikut:

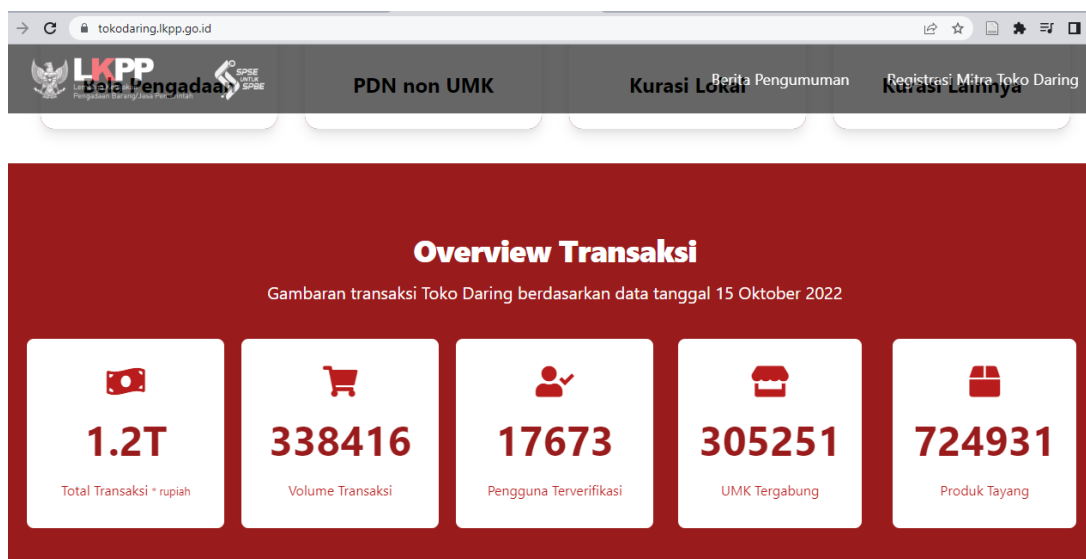
Pembelian ke dan Tahun	Jumlah
1 Tahun 2022	Rp. 125.165.991,00
2 Tahun 2022	Rp. 90.504.640,00

3 Tahun 2022	Rp. 89.115.877,00
Jumlah	Rp. 220. 994. 955

Tabel 2. Invoice Tagihan Pembelian Komputer

Data diatas menunjukkan perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran yang ada. Perbedaan tersebut terjadi dengan beberapa kemungkinan, diantaranya perbedaan harga lebih murah dibandingkan dengan harga perkiraan atau terdapat perbedaan kuantitas dalam pengadaan yang direalisasikan. Permasalahannya adalah dalam rencana yang dibuat tidak disertakan jumlah komputer yang akan dibeli. Hal ini membuat realisasi anggaran yang dilakukan tidak dapat dinilai sudah sesuai atau belum.

Beberapa permasalahan lainnya dalam proses pengadaan ini, yang ditemukan pada pelaksanaan *E-purchasing* adalah seperti ketersediaan barang yang kurang dan pembatalan pesanan oleh penyedia seperti yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah (Syamsul et al., 2021:39), kelengkapan informasi yang kurang pada katalog elektronik (Lestyowati, 2018:671), serta permasalahan jaringan yang memperlambat proses pembelian seperti yang terjadi pada LPSE Kota Malang (Habibi & Untari, 2018:165).



Gambar 2 Tampilan laman Toko Daring

Sumber : tokodaring.lkpp.go.id

Pada pelaksanaan pembelian barang peralatan komputer di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sering kali Pejabat Pengadaan mengalami kendala yang berasal dari sistem pengadaan elektronik yang masih belum berjalan dengan baik. Contohnya seperti aplikasi Toko Daring yang tidak dapat diakses di jam kerja karena mengalami gangguan *server* dan perubahan harga pada barang yang sudah dipesan secara *online* karena harga yang tertera pada katalog elektronik di aplikasi Toko Daring belum diperbaharui atau tidak di-*update* oleh penyedia barang sehingga pesanan yang telah diajukan harus dibatalkan kembali.



Gambar 3 Gangguan server pada aplikasi pengadaan

Sumber : <https://lpse.lkpp.go.id>

Kendala-kendala tersebut memiliki dampak terhadap pelaksanaan pembelian barang peralatan komputer pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Gangguan yang terjadi di server toko daring berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan pembelian barang peralatan komputer secara elektronik. Selain itu katalog elektronik yang tidak diperbaharui sehingga mengakibatkan perubahan harga pada barang yang sudah dipesan juga berdampak pada rencana anggaran yang sudah disusun oleh Pejabat Pengadaan. Identifikasi kebutuhan barang dan rencana anggaran direncanakan pada akhir tahun sebelum

pembelian dilakukan pada tahun berikutnya, maka ketika harga barang naik ditahun berikutnya sistem *e-katalog* yang belum diperbaharui berpotensi menyebabkan pembatalan pemesanan. Adanya kendala pada proses pemesanan barang melalui toko daring tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembelian terganggu.

Sebagai usaha mencapai efisiensi serta efektivitas secara maksimal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maka pengadaan secara elektronik dilakukan. Berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang pada Pasal 6 terdapat beberapa prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, dapat bersaing, adil, dan akuntabel. Metode *e-purchasing* pada pengadaan barang juga dilaksanakan untuk memperoleh kenyamanan dalam mencari informasi serta pelaksanaan pembelian barang dan menghemat waktu serta biaya. Mengacu pada teori yang dikemukakan Mulyadi (Indrayati, 2016:80) bahwa pembelian terdiri dari lima tahap yaitu permintaan pembelian, permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, order pembelian, pencatatan utang, dan distribusi pembelian. Kegagalan pada salah satu tahap ini menyebabkan proses pembelian barang secara elektronik menjadi terhambat dan memunculkan pertanyaan terhadap penerapan *e-purchasing* yang seharusnya memudahkan pekerjaan organisasi. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berbagai penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* dan *e-purchasing* sudah cukup banyak diteliti, seperti penelitian yang berfokus pada evaluasi sistem *e-purchasing* oleh Syamsul *et.al* (2021:37), penelitian tentang efek penggunaan aplikasi *e-purchasing* oleh Febrianto *et.al* (2018:363), penelitian tentang permasalahan yang terjadi pada sistem *e-*

purchasing oleh Fadillah *et.al* (2022:123) dan Panayiotou *et.al* (2004:79), penelitian tentang pelaksanaan *e-procurement* sebagai inovasi dalam bidang pengadaan oleh Kaliannan *et.al* (2009:27) dan Nurlukman (2018:81), penelitian terkait keberhasilan implementasi *e-purchasing* oleh Deraman *et.al* (2013:82), penelitian terkait analisis pengadaan melalui *e-purchasing* oleh Utiahman *et.al* (2022:79), penelitian tentang pengaruh pelaksanaan e-katalog oleh Iqbal (2020:77) dan efektivitas *e-procurement* oleh Dewi *et.al* (2018:138). Sedangkan penelitian dengan fokus pelaksanaan pembelian barang peralatan komputer secara elektronik menggunakan metode *e-purchasing* khususnya di instansi pemerintah provinsi Sumatera Selatan belum banyak dikaji. Penggunaan teori pembelian dengan lokus BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta mengingat pentingnya inovasi *e-procurement* dalam mengurangi permasalahan pembelian barang secara elektronik dilakukan bagi sektor publik, maka perlu pengamatan lebih lanjut tentang pembelian barang peralatan komputer secara elektronik melalui aplikasi Toko Daring di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk mengetahui bagaimana pembelian barang peralatan komputer secara elektronik dilakukan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dan mengetahui kendala yang terdapat saat melaksanakan pembelian barang peralatan komputer secara elektronik melalui Toko Daring di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Pembelian Barang Peralatan Komputer Secara Elektronik Pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Dilakukan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelian barang peralatan komputer secara elektronik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menyumbangkan pemikiran bagi kajian Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi Manajemen Sektor Publik. Khususnya terhadap pelaksanaan pembelian barang peralatan komputer secara elektronik menggunakan metode *e-purchasing* di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Diperolehnya bantuan pemikiran dan tenaga terdidik yang dapat memberikan saran dan masukan bagi permasalahan pelaksanaan pembelian barang yang dilakukan secara elektronik (*e-purchasing*) pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>
- Aman, A., & Kasimin, H. (2011). *E-procurement implementation: A case of Malaysia government. Transforming Government: People, Process and Policy*, 5(4), 330–344. <https://doi.org/10.1108/17506161111173586>
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish. Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books?id=G-YvDwAAQBAJ>
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran *E-Procurement* Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo-Bis : Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/nbs.v10i1.1581>
- Benny, B., Nugroho, N., Hutabarat, F. A. M., Supriyanto, S., & Arwin, A. (2021). Motivasi Kerja Karyawan PT Abdi Wibawa Press Medan. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, 3(1), Article 1. <http://prosiding.seminar-id.com/index.php/sensasi/article/view/593>
- Damayanti, A. I., Domai, T., & Wachid, A. (2013). Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik FIA UB*, 1(2), 8. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/37>
- Darusman, F., & Wijaya, C. (2020). Kapabilitas Dinamis Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7925>
- Deraman, R., Rahim, F. A., Mohamed, O., & Othman, M. (2013). *E-Purchasing Implementation Success (E-Pis) Framework In Construction Organizations: An Empirical Analysis. Journal of Building Performance (JBP)*, 4(1). <https://spaj.ukm.my/jsb/index.php/jbp/article/view/90>
- Dewi, D. K., Kuncoro, D. B., & Mahendrati, R. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 12. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/231>
- Djohan, A. J. (2016). *Manajemen & Strategi Pembelian* (1st ed.). Media Nusa Creative. Malang. <http://eprints.ulm.ac.id/1820/1/3RA.pdf>

- Eyob, E. (2004). *E-government: Breaking the frontiers of inefficiencies in the public sector. Electronic Government, an International Journal*, 1(1), 107. <https://doi.org/10.1504/EG.2004.004140>
- Fadillah, S. S., Effendi, S., & Aryansah, J. E. (2022). *Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Operasional Dinas Melalui Aplikasi Elektronik (E-Katalog) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan [Undergraduate, Faculty of Social and Poitical Science, Sriwijaya University]*. <https://repository.unsri.ac.id/74980/>
- Febrianto, G., Hidayatullah, S., & Ardianto, Y. (2018). *The Effect of Intention to Usage to Actual Usage E-Purchasing Application. International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9, 363–370. https://www.researchgate.net/publication/338402902_The_Effect_of_Intention_to_Usage_to_Actual_Usage_E-Purchasing_Application
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta. <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p159-168>
- Hardy, C. A., & Williams, S. P. (2008). *E-government policy and practice: A theoretical and empirical exploration of public e-procurement. Government Information Quarterly*, 25(2), 155–180. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.02.003>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), Article 1. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163/932>
- Hidayat, R., Arifin, Z., & Tamiang, Y. (2021). Tafsir Ayat-Ayat tentang Fungsi Manajemen Pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 88–107. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/161>
- Indrajit, R. E., Djokopranoto, R., & Hardiwati, Y. (2005). *Strategi Manajemen Pembelian dan Supply Chain: Pendekatan Manajemen Pembelian Terkini Untuk Menghadapi Persaingan Global*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Indrayati, Dra. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi (Teori Konsep Desain SIA)* (2nd ed.). Aditya Media Publishing. Malang
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>

- Kaliannan, M., Awang, H., & Raman, M. (2009). *Government Purchasing: A Review Of E-Procurement System In Malaysia*. *Knowledge Management*, 4. https://www.researchgate.net/publication/228375386_Government_purchasing_A_review_of_E-procurement_system_in_Malaysia
- Lee, J., Oh, K.-T., & Kwon, H. Y. (2008). *Striving for Transparency and Efficiency in e-Government: Procurement Reform through e-Procurement*. *ICEGOV '08 : Proceedings of the 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 183–190. <https://doi.org/10.1145/1509096.1509133>
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan *E-Purchasing* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja. *Simposium Nasional Keuangan negara*, 1(1), 27. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/224>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc. California
- Mulyono, P. E. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 32–42. <https://www.e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/18010>
- Munir, M. (2015). Efektivitas *Electronic Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(4). <https://doi.org/10.26740/publika.v3n4.p%p>
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>
- Niswah, U., & Setiawan, M. R. (2021). Implementasi Fungsi *Actuating* Dalam Pembinaan Santri Di Pondok Pesantren. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1), 18. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2708143&val=24691&title=Implementasi%20Fungsi%20Actuating%20Dalam%20Pembinaan%20Santri%20di%20Pondok%20Pesantren>
- Nurchana, A. R. A., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik FIA UB*, 2(2), 5. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/385>
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka (*Open Government*) Melalui Penerapan *E Government*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 17. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/443>

- Nurlukman, A. D. (2018). *e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia*. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.264>
- Panayiotou, N. A., Gayialis, S. P., & Tatsiopoulou, I. P. (2004). *An e-procurement system for governmental purchasing*. *International Journal of Production Economics*, 90(1), 79–102. [https://doi.org/10.1016/S0925-5273\(03\)00103-8](https://doi.org/10.1016/S0925-5273(03)00103-8)
- Priambadi, K., & Nurcahyo, A. (2018). Tradisi Jamasan Pusaka Di Desa Baosan Kidul Kabupaten Ponorogo (Kajian Nilai Budaya Dan Sumber Pembelajaran Sejarah). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i2.2678>
- Rahmalina, N. (2018). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik Di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi* [Faculty of Social and Political Science, Sriwijaya University]. <https://repository.unsri.ac.id/12718/>
- Rengganis, A., Haruna, N. H., Sari, A. C., Sitopu, J. W., Brata, D. P. N., Gurning, K., Hasibuan, F. A., Chamidah, D., Karwanto, K., Muharlisiani, L. T., Martha, K., & Subakti, H. (2022). *Penelitian dan Pengembangan*. Yayasan Kita Menulis. <https://kitamenulis.id/2022/11/16/penelitian-dan-pengembangan/>. Jakarta
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), Article 33. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Satria, W. I., Hermawan, Y. H., & Akbar, M. F. H. (2021). Definisi Sistem Portal Pengetahuan dalam Pemerintahan berdasarkan Pendekatan Modifikasi Soft System Methodology dan Hermeneutic. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i1.518>
- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., Silalahi, M., & Dewi, I. K. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis. Jakarta. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Sektor_Publik/16gGEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen+Sektor+Publik&printsec=frontcover
- Sumakul, Y., & Ruata, S. (2020). Kesejahteraan psikologis Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Psychology "Humanlight,"* 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51667/jph.v1i1.302>
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 251–259. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.15>

- Syah, J. M., & Sofyan, D. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP di Kampung Paledang Suci Kaler pada Materi Segiempat dan Segitiga. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31980/plusminus.v1i2.1270>
- Syamsul, D., Amirah, A., & Zikri, Z. (2021). *Evaluation of Drug Procurement with the E-Purchasing System on the Availability of Drugs at the Pharmacy Installation of the Central Aceh Regency Health Office*. *Journal of Asian Multicultural Research for Medical and Health Science Study*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.47616/jamrmhss.v2i4.204>
- Takdir, I., Ismail, A., Fitrianiingsi, J., & Suhardianto. (2022). Dampak Media Online Dalam Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Pada Masa Pandemi Covid-19 MTS Muhammadiyah Takwa. *EDULEC : Education, Language And Culture Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56314/edulec.v2i1.29>
- Teicher, J., Hughes, O., & Dow, N. (2002). *E-Government: A New Route To Public Sector Quality*. *Managing Service Quality: An International Journal*, 12(6), 384–393. <https://doi.org/10.1108/09604520210451867>
- Thoif, M. (2022). Manajemen Sekolah Dan Pembelajaran Yang Mencerdaskan. *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, 6(1), 18. <http://jurnal1.uniyap.ac.id/uyp/index.php/atjkk/login>
- Utiahman, K., Muda, L., & Panigoro, W. (2022). *Analysis Of Government Goods/Service Procurement Processes Through E-Purchasing System In The Environment Gorontalo District*. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 2(4), 79–94. <https://doi.org/10.47918/jeba.v2i4.422>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>